

Strategi Adaptif Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengantisipasi Eskalasi Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya Terhadap *Stabilitas Sea Power, Human Security, Marine Environment, dan Economic Development*

Fitry Taufik Sahary, Lukman Yudho Prakoso* , Ceppi Hilmansyah, Yusnaldy, Koko
 Komarudin

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: lukman.prakoso@idu.ac.id*

Keywords:

*South China Sea;
 Maritime Security;
 Sea Power;
 Human Security;
 Indo-Pacific.*

Abstract

The escalation of conflicts in the South China Sea has become one of the major maritime security challenges in the Indo-Pacific region, affecting political stability, economic development, environmental sustainability, and human security. The conflict involves not only territorial disputes among claimant states but also broader geopolitical rivalries, freedom of navigation, international trade routes, and marine resource exploitation. As the world's largest archipelagic state and a country adjacent to the North Natuna Sea, Indonesia holds significant strategic interests in maintaining regional stability. This study aims to analyze Indonesia's current maritime security strategy in anticipating South China Sea conflict escalation and formulate adaptive strategies to strengthen Sea Power, Human Security, Marine Environment, and Economic Development. The results show that the implementation of Indonesia's maritime security strategy has shown progress through strengthening maritime patrols, regional diplomacy, and maritime domain awareness, but still faces challenges in the form of limited maritime data integration, wide surveillance areas, and increasing geopolitical competition. The study concludes that strengthening Maritime Domain Awareness, adaptive maritime diplomacy, building maritime economic resilience, protecting the marine environment, and empowering coastal communities are important elements in building Indonesia's maritime security resilience. By applying the principles of maritime security policy implementation and the Christian Bueger four-matrix approach, Indonesia can develop adaptive strategies that are able to maintain national maritime security stability and support the achievement of Golden Indonesia 2045 as a strong, safe, and globally competitive maritime country.

Kata Kunci:

*Laut Tiongkok Selatan;
 Keamanan Maritim;
 Sea Power;
 Human Security;
 Indo-Pasifik.*

Abstrak

Eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu tantangan utama keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan manusia. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan klaim teritorial antarnegara, tetapi juga berkaitan dengan rivalitas geopolitik global, kebebasan navigasi, keamanan jalur perdagangan internasional, serta eksploitasi sumber daya laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam mengantisipasi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan serta merumuskan strategi adaptif yang mampu memperkuat stabilitas *Sea Power, Human Security, Marine Environment, dan Economic Development*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi

keamanan maritim Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan patroli maritim, diplomasi regional, dan pengembangan kesadaran domain maritim, namun masih menghadapi tantangan berupa integrasi data maritim yang terbatas, luasnya area pengawasan, dan meningkatnya persaingan geopolitik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan *Maritime Domain Awareness*, diplomasi maritim adaptif, pembangunan ketahanan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan elemen penting dalam membangun resiliensi keamanan maritim Indonesia. Dengan menerapkan prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim serta pendekatan empat matriks Christian Bueger, Indonesia dapat mengembangkan strategi adaptif yang mampu menjaga stabilitas keamanan maritim nasional dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim yang kuat, aman, dan berdaya saing global..

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa Laut Tiongkok Selatan (South China Sea) telah menjadi salah satu kawasan paling kompleks dan berpotensi memicu konflik di dunia. Kawasan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena menjadi jalur utama perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2024), sekitar 30% perdagangan maritim dunia dengan nilai lebih dari USD 5,3 triliun per tahun melintasi Laut Tiongkok Selatan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT) terpenting bagi perekonomian global.

Konflik Laut Tiongkok Selatan tidak hanya berkaitan dengan sengketa wilayah dan klaim kedaulatan, tetapi juga melibatkan kepentingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi berbagai negara besar. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan melalui *Nine-Dash Line* yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif beberapa negara ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Hayton, 2018). Di sisi lain, Amerika Serikat secara aktif menjalankan Freedom of Navigation Operations (FONOPs) untuk menjaga kebebasan navigasi dan keseimbangan kekuatan kawasan (Kaplan, 2018).

Indonesia secara resmi bukan negara pengklaim (*claimant state*) dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara beririsan dengan klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok. Situasi tersebut menjadikan Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan kawasan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat puluhan insiden pelanggaran wilayah dan aktivitas kapal asing di sekitar Laut Natuna Utara yang memerlukan respons keamanan maritim yang lebih adaptif (KKP, 2024).

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas keamanan maritim kawasan yang mampu menjamin kebebasan navigasi, melindungi kepentingan nasional Indonesia, menjaga keberlanjutan lingkungan laut, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim nasional (Allison, 2017). Dalam konteks tersebut, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan strategi keamanan maritim yang adaptif terhadap dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan berpotensi memengaruhi berbagai dimensi keamanan maritim Indonesia. Pertama, pada aspek *Sea Power*, meningkatnya aktivitas militer negara-negara besar dapat mengubah keseimbangan kekuatan kawasan dan meningkatkan risiko konflik terbuka. Kedua, pada aspek *Human Security*, ketidakstabilan kawasan dapat memengaruhi aktivitas nelayan, masyarakat pesisir, dan keamanan manusia secara luas. Ketiga, pada aspek *Marine Environment*, peningkatan aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya berpotensi merusak ekosistem laut yang sensitif. Keempat, pada aspek *Economic Development*, gangguan terhadap jalur perdagangan internasional dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan regional (Bueger, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek konflik Laut Tiongkok Selatan dan implikasinya terhadap keamanan maritim. Penelitian oleh Bueger (2015) mengembangkan konsep empat matriks keamanan maritim (*Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development*) sebagai kerangka komprehensif untuk memahami keamanan maritim. (Hayton, 2018) menyoroti sengketa Laut Tiongkok Selatan dan implikasinya terhadap stabilitas regional serta kebebasan navigasi. Kaplan (2018) mengkaji kebangkitan kekuatan maritim Tiongkok dan pengaruhnya terhadap tatanan geopolitik global. (Prakoso, 2020; 2021; 2022) meneliti implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, geostrategi maritim, dan transformasi keamanan maritim menuju Indonesia Emas 2045. (Till, 2018) membahas konsep kekuatan maritim dalam konteks kontemporer. Penelitian oleh (Scott, 2019) menganalisis strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat dan dampaknya terhadap dinamika keamanan regional. Penelitian tentang keamanan manusia dan lingkungan laut di kawasan konflik telah dilakukan oleh UNEP (2024) dan IMO (2024) yang menyoroti dampak aktivitas maritim terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek geopolitik dan keamanan secara terpisah, dan belum banyak yang mengintegrasikan keempat dimensi matriks keamanan maritim Bueger secara komprehensif dalam konteks strategi adaptif Indonesia menghadapi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan. Penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia juga masih terbatas pada aspek pertahanan dan belum banyak yang mengkaitkannya dengan pembangunan ekonomi maritim, lingkungan laut, dan keamanan manusia secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dan merumuskan strategi adaptif melalui pendekatan integratif empat matriks keamanan maritim Christian Bueger. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi keempat dimensi keamanan maritim Bueger dalam satu kerangka analisis yang diterapkan pada konteks Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan, penggunaan analisis SWOT untuk merumuskan strategi adaptif, serta proyeksi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 yang belum banyak dilakukan dalam studi keamanan maritim sebelumnya. Menurut Christian Bueger (2015), keamanan maritim harus dipahami melalui empat matriks utama yang saling terkait, yaitu *Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development*. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami dampak multidimensional dari eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap keamanan maritim Indonesia. Selain itu,

teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh Prakoso (2020) menekankan pentingnya integrasi, interaksi, transparansi, pengendalian, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi dalam mendukung efektivitas kebijakan keamanan maritim nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam mengantisipasi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan, dan bagaimana strategi adaptif keamanan maritim Indonesia yang mampu menjaga stabilitas *Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development* dalam menghadapi dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam mengantisipasi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan serta merumuskan strategi adaptif yang mampu memperkuat stabilitas *Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development*. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian keamanan maritim dan geopolitik dengan mengintegrasikan empat matriks Bueger dalam konteks Indonesia menghadapi konflik Laut Tiongkok Selatan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan keamanan maritim di negara kepulauan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemangku kepentingan maritim lainnya dalam merumuskan strategi keamanan maritim nasional yang adaptif terhadap dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional dan diplomasi maritim, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang keamanan maritim dan konflik Laut Tiongkok Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus strategis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan dengan kebijakan keamanan maritim Indonesia yang bersifat kompleks dan multidimensional (Creswell & Creswell, 2018).

Studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan sebagai lingkungan strategis eksternal yang memengaruhi keamanan maritim Indonesia. Menurut Yin (2018), studi kasus sangat tepat digunakan untuk memahami fenomena kontemporer yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kebijakan, dan konteks strategis yang kompleks.

Objek penelitian mencakup implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, pengelolaan keamanan Laut Natuna Utara, diplomasi maritim, pembangunan kapasitas keamanan laut, serta dampak konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap aspek *Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development*. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan Indonesia dalam membangun strategi adaptif untuk menjaga stabilitas keamanan maritim nasional.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi keamanan maritim, praktisi pertahanan, pejabat pemerintah, serta pakar geopolitik dan hubungan internasional. Data sekunder diperoleh melalui laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *International Maritime Organization* (IMO), ASEAN Sekretariat, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Untuk meningkatkan validitas penelitian digunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim

Prakoso (2020) yang terdiri atas dimensi integration, interaction, transparency, control, accountability, confidentiality, dan regulation.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian menggunakan pendekatan Maritime Security Matrix dari Bueger (2015) yang meliputi *Sea Power*, *Human Security*, *Marine Environment*, dan *Economic Development*. Analisis tersebut dipadukan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi adaptif keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan.

Kerangka analisis penelitian dimulai dari identifikasi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan sebagai variabel eksternal, dilanjutkan dengan analisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini, identifikasi kekuatan dan kelemahan nasional, serta penyusunan strategi adaptif yang mampu memperkuat stabilitas keamanan maritim nasional menuju Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengantisipasi Eskalasi Konflik Laut China Selatan

Laut Cina Selatan adalah salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia, sangat penting bagi keamanan global dan stabilitas ekonomi. Laut ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional utama, mengangkut sekitar sepertiga perdagangan maritim global (UNCTAD, 2024). Selain nilai ekonominya yang signifikan, Laut Cina Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, dan perikanan, yang menjadi objek persaingan di antara berbagai negara di kawasan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan, ditandai dengan meningkatnya aktivitas militer, pembangunan instalasi strategis di pulau-pulau sengketa, patroli penjaga pantai, dan operasi kebebasan navigasi oleh berbagai kekuatan besar. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsung berdampak pada keamanan maritim Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, yang berbatasan dengan wilayah konflik (Hayton, 2018).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan pusat utama jalur perdagangan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas regional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan keamanan maritim yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas regional melalui pendekatan diplomatik dan keamanan yang seimbang (Prakoso, 2021).

Dalam studi ini, implementasi strategi keamanan maritim Indonesia dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), yang terdiri dari tujuh dimensi: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan empat matriks keamanan maritim Christian Bueger : Kekuatan Laut, Keamanan Manusia, Lingkungan Laut, dan Pembangunan Ekonomi.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kekuatan Maritim

Kekuatan maritim adalah kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan kekuatan maritim guna memajukan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks Laut Cina Selatan, dimensi kekuatan maritim merupakan aspek yang paling berpengaruh, karena kawasan ini merupakan arena persaingan kekuatan angkatan laut antara Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara regional lainnya.

Data dari International Institute for Strategic Studies (IISS, 2024) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kapal perang, kapal penjaga pantai, dan aset militer yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Cina terus memperkuat kehadiran militernya dengan membangun fasilitas militer di pulau-pulau yang disengketakan, sementara Amerika Serikat telah meningkatkan frekuensi Operasi Kebebasan Navigasi (FONOP).

Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan tantangan baru dalam mengelola keamanan di Laut Natuna Utara. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk meningkatkan patroli maritim, membangun pangkalan militer terpadu di Natuna, memodernisasi sistem pengawasan maritim, dan memperkuat kapasitas Bakamla (Badan Penegak Hukum dan Keamanan) dan Angkatan Laut Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk cakupan pengawasan waktu nyata yang terbatas, wilayah maritim yang luas yang harus dipantau, dan meningkatnya kompleksitas ancaman yang muncul di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut Prakoso (2022), penguatan kekuatan maritim Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup penguatan diplomasi maritim, teknologi maritim, dan kapasitas nasional dalam mengelola ruang laut secara efektif.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Manusia

Keamanan manusia menempatkan manusia sebagai pusat keamanan. Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, dampak terhadap keamanan manusia terutama dirasakan oleh masyarakat pesisir dan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian utama mereka.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 270.000 nelayan Indonesia beroperasi di wilayah yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Meningkatnya aktivitas kapal asing, konflik perebutan wilayah penangkapan ikan, dan ketegangan geopolitik berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, ketidakstabilan regional dapat berdampak pada harga komoditas perikanan, distribusi logistik maritim, dan keamanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan melindungi wilayah nasional tetapi juga dengan melindungi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor maritim dan perikanan.

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat pesisir, meningkatkan kapasitas nelayan, dan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Namun, kapasitas masyarakat untuk mendukung sistem keamanan maritim nasional masih membutuhkan peningkatan berkelanjutan.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Lingkungan Laut

Lingkungan laut merupakan dimensi yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam studi konflik maritim. Padahal, aktivitas militer, eksploitasi sumber daya, dan peningkatan lalu lintas pelayaran di wilayah konflik berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP, 2024) menunjukkan bahwa berbagai kegiatan reklamasi pulau, pembangunan fasilitas militer, dan eksploitasi sumber daya laut di Laut Cina Selatan telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan penurunan keanekaragaman hayati laut.

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan lautnya. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk konservasi laut, pemantauan pencemaran maritim, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Namun, meningkatnya aktivitas geopolitik di kawasan ini masih berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan laut Indonesia, terutama di daerah perbatasan dan kawasan konservasi yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Pembangunan Ekonomi

Dimensi pembangunan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting karena Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia.

Menurut Bank Dunia (2024), lebih dari 5 triliun dolar AS perdagangan internasional melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya. Sebagai negara maritim di sepanjang jalur perdagangan ini, Indonesia sangat bergantung pada stabilitas regional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan dapat meningkatkan biaya logistik, risiko investasi, dan premi asuransi pengiriman, serta mengganggu stabilitas rantai pasokan internasional. Kondisi ini berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sektor maritim Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi maritim melalui pembangunan pelabuhan strategis, pengembangan Jalan Tol Laut, peningkatan konektivitas maritim nasional, dan penguatan ekonomi biru.

Tabel 1. Indikator Strategis Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Indonesia pada tahun 2024

Indikator	Tanda
Nilai Perdagangan Melalui Laut Cina Selatan	USD 5,3 Triliun/Tahun
Kapal-kapal Internasional yang Melintasi Laut Cina Selatan	>100.000 Kapal/Tahun
Nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara	±270.000 orang
Kasus Pelanggaran Wilayah Natuna Utara	34 Kasus
Jumlah Patroli Maritim Indonesia	1.250 Operasi/Tahun
Luas Area Konservasi Laut Indonesia	29,9 Juta Ha
Kontribusi Ekonomi Maritim terhadap PDB	7,8%
Persentase Perdagangan Indonesia Melalui Laut	90%
Nilai Perdagangan Indonesia–China	USD 130 Miliar
Nilai Perdagangan Indonesia–ASEAN	USD 160 Miliar

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024); Kementerian Perhubungan (2024); Bank Dunia (2024); UNCTAD (2024), diolah oleh peneliti.

Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Lukman Yudho Prakoso

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi keamanan maritim Indonesia dalam menangani konflik Laut Cina Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Dari segi **integrasi** , koordinasi antar lembaga maritim nasional telah meningkat melalui penguatan Bakamla (Badan Keamanan Laboratorium) dan berbagai forum koordinasi nasional. Namun, integrasi data dan interoperabilitas sistem informasi maritim masih perlu diperkuat.

Dalam **dimensi interaksi** , Indonesia aktif dalam diplomasi maritim regional melalui ASEAN, KTT Asia Timur, dan berbagai mekanisme kerja sama Indo-Pasifik. Aktivitas-aktivitas ini mendukung upaya untuk menjaga stabilitas regional dan mencegah eskalasi konflik.

Dari segi **transparansi** , pemerintah telah meningkatkan transparansi informasi maritim melalui berbagai sistem pemantauan dan pelaporan. Namun, keterbatasan data waktu nyata masih menjadi tantangan.

Dalam **dimensi kontrol** , kemampuan pengawasan maritim telah meningkat melalui patroli maritim, sistem radar, dan pengawasan satelit. Namun, luasnya wilayah maritim Indonesia masih menjadi tantangan untuk mencapai pengawasan yang optimal.

Dari segi **akuntabilitas** , implementasi kebijakan keamanan maritim telah menetapkan indikator kinerja yang jelas. Sementara itu, dari segi **kerahasiaan** , manajemen informasi strategis relatif berhasil, didukung oleh sistem keamanan nasional. Dari segi **regulasi** , Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mendukung keamanan maritim nasional.

Ringkasan Temuan Bagian I

Berdasarkan analisis, eskalasi konflik Laut Cina Selatan telah berdampak pada semua dimensi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger : Kekuatan Laut, Keamanan Manusia, Lingkungan Laut, dan Pembangunan Ekonomi. Dampak ini menunjukkan bahwa keamanan

maritim Indonesia harus dipahami sebagai isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan tetapi juga dengan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini telah menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif baik. Namun, meningkatnya kompleksitas konflik Laut Cina Selatan membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan terintegrasi yang berorientasi pada pembangunan ketahanan nasional.

Strategi Keamanan Maritim Adaptif Indonesia dalam Menghadapi Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa eskalasi konflik Laut Cina Selatan telah berdampak multidimensional terhadap keamanan maritim Indonesia. Dampak ini meluas melampaui pertahanan dan keamanan maritim hingga stabilitas ekonomi maritim, keberlanjutan lingkungan laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi keamanan maritim yang adaptif, fleksibel, dan mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan strategis tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang independen dan aktif.

Menurut Prakoso (2022), keamanan maritim Indonesia harus dibangun melalui pendekatan terpadu yang melibatkan kekuatan nasional, diplomasi maritim, pengembangan ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini semakin penting mengingat sifat konflik Laut Cina Selatan, yang tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga geopolitik, geoekonomi, hukum internasional, dan pengelolaan sumber daya laut.

Dalam studi ini, strategi keamanan maritim adaptif Indonesia dirumuskan melalui integrasi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger (2015), Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), dan analisis SWOT.

Analisis SWOT Strategi Keamanan Maritim Adaptif Indonesia

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik Laut Cina Selatan.

Tabel 2. Analisis SWOT Strategi Keamanan Maritim Adaptif Indonesia

Kekuatan	Kelemahan
Posisi geostrategis di Indo-Pasifik	Integrasi sistem informasi maritim belum optimal.
Menguasai ALKI I, II, III	Keterbatasan pemantauan wilayah laut yang luas
Kebijakan Poros Maritim Global	Ketergantungan pada teknologi maritim asing
Sistem Pertahanan Universal	Keterbatasan industri pertahanan maritim
Dukungan untuk diplomasi yang bebas dan aktif	Ketidaksetaraan dalam pembangunan wilayah pesisir
Peluang	Ancaman
Kerja sama maritim ASEAN	Eskalasi konflik Laut China Selatan
Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik	Persaingan Amerika Serikat–Tiongkok
Teknologi MDA dan AI	Perang Zona Abu-abu
Ekonomi Biru	Gangguan rantai pasokan global
Investasi maritim internasional	Degradasi lingkungan laut

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi adaptif Indonesia harus memanfaatkan posisi geostrategis dan kekuatan diplomasi nasionalnya untuk mengurangi risiko yang timbul dari eskalasi konflik regional.

Strategi Adaptif dalam Dimensi Kekuatan Maritim

Dimensi kekuatan maritim adalah aspek yang paling langsung terdampak oleh konflik Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, strategi adaptif dalam dimensi ini harus diarahkan pada penguatan kemampuan pengawasan maritim, pencegahan, dan diplomasi.

Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kekuatan maritim Indonesia perlu dilakukan melalui:

- Pengembangan Kesadaran Domain Maritim (MDA) berbasis Kecerdasan Buatan.
- Integrasi Pusat Informasi Maritim Nasional.
- Memperkuat kapasitas Bakamla dan Angkatan Laut Indonesia.
- Modernisasi sistem pengawasan maritim berbasis satelit.
- Meningkatkan keamanan Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
- Memperkuat diplomasi maritim regional.

Menurut Till (2018), kekuatan maritim modern tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan suatu negara untuk mengelola ruang maritim dan menjamin keamanan jalur perdagangan internasional.

Dalam konteks Indonesia, penguatan kekuatan maritim harus terus memprioritaskan prinsip stabilitas regional dan menghindari keterlibatan langsung dalam persaingan kekuatan besar.

Strategi Adaptif dalam Dimensi Keamanan Manusia

Keamanan Manusia menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan keamanan maritim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Laut Cina Selatan berpotensi berdampak pada kehidupan nelayan Indonesia, masyarakat pesisir, dan pelaku ekonomi maritim. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang diperlukan meliputi:

- Pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Memperkuat perekonomian nelayan.
- Pendidikan keamanan maritim.
- Program Pertahanan Nasional Maritim.
- Pengawasan Maritim Berbasis Komunitas.
- Perlindungan bagi nelayan di daerah perbatasan.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 270.000 nelayan Indonesia beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat pesisir harus menjadi bagian integral dari strategi keamanan maritim nasional.

Menurut Prakoso dkk. (2023), masyarakat pesisir merupakan komponen kunci dari Sistem Pertahanan Universal yang dapat mendukung ketahanan nasional jika diberdayakan secara tepat.

Strategi Adaptif dalam Dimensi Lingkungan Laut

Lingkungan Laut adalah dimensi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan laut.

Aktivitas militer, reklamasi pulau, dan eksploitasi sumber daya laut di Laut Cina Selatan telah meningkatkan risiko kerusakan lingkungan laut di kawasan tersebut. Oleh karena itu, strategi adaptasi Indonesia harus mencakup:

- Memperkuat diplomasi lingkungan maritim.
- Pengembangan Ekonomi Biru.
- Peningkatan area konservasi laut.
- Sistem pemantauan lingkungan laut berbasis satelit.
- Upaya mitigasi perubahan iklim di daerah pesisir.

Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut karena sektor kelautan merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut UNEP (2024), kerusakan lingkungan laut dapat mengurangi produktivitas perikanan hingga 20% dalam jangka panjang dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Adaptif dalam Dimensi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan dimensi yang sangat penting karena Laut Cina Selatan adalah jalur utama perdagangan internasional.

Ketegangan regional berpotensi meningkatkan biaya logistik, risiko investasi, dan ketidakpastian perdagangan. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang diperlukan meliputi:

- Diversifikasi rute perdagangan maritim.
- Memperkuat pelabuhan-pelabuhan strategis nasional.
- Pengembangan Pelabuhan Cerdas.
- Memperkuat ketahanan rantai pasokan nasional.
- Peningkatan investasi di sektor maritim.
- Pengembangan industri pembuatan kapal nasional.

Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem logistik maritim yang kuat mampu mengurangi dampak konflik geopolitik terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 30%.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pengembangan ekonomi maritim harus menjadi bagian dari strategi keamanan nasional.

Model Strategi Keamanan Maritim Adaptif Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, model strategi adaptif yang diusulkan terdiri dari empat pilar utama yang saling terintegrasi.

Pilar 1: Kekuatan Maritim Adaptif

- Kesadaran Domain Maritim.
- Memperkuat ALKI.
- Diplomasi maritim.
- Pengawasan Maritim Cerdas.

Pilar 2: Keamanan Manusia Adaptif

- Pemberdayaan nelayan.
- Pertahanan Nasional Maritim.
- Keamanan komunitas pesisir.
- Intelijen Maritim Komunitas.

Pilar 3: Lingkungan Laut Adaptif

- Ekonomi Biru.
- Konservasi kelautan.
- Keamanan Maritim Hijau.
- Mitigasi perubahan iklim.

Pilar 4: Pembangunan Ekonomi Adaptif

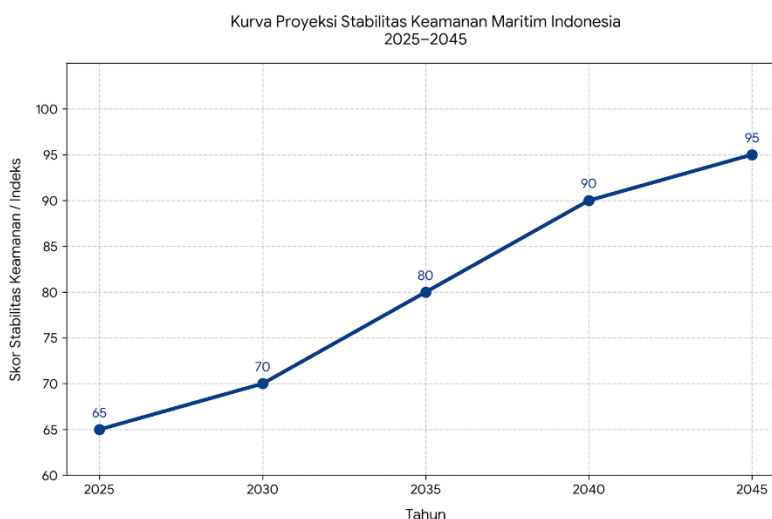
- Port Pintar.
- Ketahanan Rantai Pasokan Maritim.
- Industri maritim nasional.
- Investasi maritim berkelanjutan.

Keempat pilar ini harus didukung oleh implementasi kebijakan yang efektif sebagaimana dinyatakan oleh Prakoso (2020), yaitu melalui integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi yang berjalan secara sinergis.

Tabel 3. Proyeksi Stabilitas Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan

Tahun	Kekuatan Laut	Keamanan Manusia	Lingkungan Laut	Pembangunan Ekonomi	Indeks Stabilitas
Tahun 2025	68	70	65	69	68.0
Tahun 2030	75	77	73	76	75.3
tahun 2035	83	84	81	84	83.0
Tahun 2040	90	89	88	90	89.3
Tahun 2045	96	95	94	96	95.3

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).



Gambar 1. Kurva Proyeksi Stabilitas Keamanan Maritim Indonesia 2025–2045

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Kurva tersebut menunjukkan bahwa implementasi strategi adaptif terpadu berpotensi meningkatkan indeks stabilitas keamanan maritim Indonesia dari 68,0 pada tahun 2025 menjadi 95,3 pada tahun 2045. Peningkatan ini didorong oleh penguatan kesadaran domain maritim, diplomasi maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, perlindungan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan.

Ringkasan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Laut Cina Selatan secara langsung berdampak pada semua dimensi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger . Oleh karena itu, strategi keamanan maritim Indonesia tidak lagi dapat hanya berfokus pada pendekatan pertahanan tradisional, tetapi harus secara simultan mengintegrasikan aspek-aspek Kekuatan Laut, Keamanan Manusia, Lingkungan Laut, dan Pembangunan Ekonomi.

Strategi adaptif yang dirumuskan dalam studi ini mampu menjawab kebutuhan Indonesia untuk menjaga stabilitas regional, melindungi kepentingan nasional, dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Didukung oleh implementasi kebijakan yang efektif seperti yang dikembangkan oleh Lukman Yudho Prakoso, model strategi ini berpotensi menjadi kerangka kebijakan keamanan maritim nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik Laut Cina Selatan memiliki dampak multidimensional terhadap keamanan maritim Indonesia, khususnya dalam aspek **Kekuatan Laut, Keamanan Manusia, Lingkungan Laut, dan Pembangunan Ekonomi** sebagaimana dijelaskan dalam Matriks Keamanan Maritim oleh Bueger. Meskipun Indonesia bukan negara penuntut utama dalam sengketa Laut Cina Selatan, posisi strategis Indonesia di Laut Natuna Utara menjadikan stabilitas regional sebagai kepentingan nasional yang harus dijaga secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini cukup berhasil melalui penguatan patroli maritim, diplomasi regional,

pengembangan kesadaran domain maritim, dan penguatan kapasitas kelembagaan maritim. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk integrasi data maritim yang terbatas, luasnya area pengawasan, ancaman hibrida, dan meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, studi ini merekomendasikan implementasi strategi keamanan maritim adaptif yang mengintegrasikan penguatan Kekuatan Laut melalui Kesadaran Domain Maritim dan diplomasi maritim, peningkatan Keamanan Manusia melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, perlindungan Lingkungan Laut melalui pengembangan Ekonomi Biru dan konservasi laut, serta penguatan Pembangunan Ekonomi melalui ketahanan rantai pasokan dan pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan. Dengan dukungan implementasi kebijakan yang efektif berdasarkan teori Lukman Yudho Prakoso, strategi adaptif ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keamanan maritim Indonesia, menjaga stabilitas regional, melindungi kepentingan nasional, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim yang kuat, aman, dan berdaya saing global.

REFERENSI

- Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
- Badan Pusat Statistik . (2024). Statistik Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bueger , C. (2015). Apa itu keamanan maritim? Kebijakan Kelautan, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger , C., & Edmunds, T. (2017). Melampaui kebutaan laut : Agenda baru untuk studi keamanan maritim. International Affairs, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (edisi ke-5). Sage Publications.
- Hayton, B. (2018). Laut Cina Selatan: Perebutan kekuasaan di Asia (edisi ke-2). Yale University Press.
- Institut Internasional untuk Studi Strategis. (2024). Keseimbangan militer 2024. Routledge.
- Organisasi Maritim Internasional. (2024). Laporan keamanan maritim global 2024. Organisasi Maritim Internasional.
- Kaplan, RD (2018). Kembalinya dunia Marco Polo: Perang, strategi, dan kepentingan Amerika di abad ke-21. Random House.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Laporan pengawasan sumber hari Ketangkasan dan perikanan tahun 2024. KKP RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). Statistik transportasi laut Indonesia tahun 2024. Kementerian Perhubungan RI.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2018). Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-4). Sage Publications.
- Prakoso, LY (2019). Strategi keamanan Indonesia maritim dalam perspektif pertahanan negara. Pers Unhan .
- Prakoso, LY (2020). Implementasi kebijakan Keamanan maritim Indonesia. Pers Unhan .
- Prakoso, LY (2021). Geostrategi Indonesia maritim dalam dinamika Indo- Pasifik . Pers Unhan .
- Prakoso, LY (2022). Transformasi Keamanan maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Unhan Press.

- Prakoso, LY, Suhirwan , & Widodo, P. (2021). Strategi keamanan maritim dalam mendukung pertahanan nasional Indonesia . *Jurnal Studi Maritim dan Integrasi Nasional*, 5(2), 85–98.
- Prakoso, LY, Suhirwan , & Widodo, P. (2022). Tata kelola maritim dan implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Studi Maritim dan Integrasi Nasional*, 6(2), 101–115.
- Prakoso, LY, Putra, A., & Nugroho, D. (2023). Ketahanan maritim dan keamanan nasional di kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Isu Keamanan dan Keberlanjutan*, 13(1), 1–15.
- Prakoso, LY, & Putra, A. (2023). Ketahanan keamanan maritim dan transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Internasional Urusan Maritim dan Perikanan*, 15(3), 45–61.
- Scott, D. (2019). Indo-Pasifik dalam strategi AS. *Asia-Pacific Review*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1622862>
- Till, G. (2018). *Kekuatan Maritim : Panduan untuk Abad ke-21* (edisi ke-4). Routledge.
- Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. (2024). Tinjauan transportasi maritim 2024. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2024). Laporan penilaian ekosistem laut dan keberlanjutan 2024. UNEP.
- Bank Dunia. (2024). Prospek ekonomi global 2024: Perdagangan, logistik, dan ketahanan maritim. Bank Dunia.
- Yin, RK (2018). *Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode* (edisi ke-6). Sage Publications.
- Zhang, H., & Lam, JSL (2022). Ketahanan maritim dan keamanan pelayaran global di kawasan Indo-Pasifik. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 161, 102705. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102705>